

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan penganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang mereka laksanakan langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dengan diimplementasikan melalui berbagai praktik dan prosedur (Sunarso, 2016). Memiliki kebebasan pers, kebebasan dalam berpendapat dan hak-hak dalam kegiatan politik lainnya yang menjamin keterlibatan aktif masyarakat merupakan bagian dari prinsip-prinsip demokratis. Salah satu manifestasi nyata dari prinsip-prinsip demokrasi adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum.

Menurut Carter dan Herz (1982), terdapat tujuh prinsip utama yang menjadi landasan negara demokrasi. Pertama, pembatasan terhadap tindakan pemerintah dilakukan dengan cara pemimpin yang diganti secara tertib, berkala, dan damai, serta melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. Kedua, sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat menjadi hal yang penting. Ketiga, keadilan dan persamaan di depan hukum dipertahankan tanpa membedakan kedudukan politik. Keempat, pemilihan dilakukan secara bebas dengan adanya representasi yang efektif. Kelima, hak untuk berpartisipasi dan beroposisi diberikan kepada organisasi masyarakat, partai politik, bahkan individu, serta kebebasan berpendapat melalui media massa dan pers. Keenam, kebebasan menyatakan pandangan menjadi hal yang ditekankan. Ketujuh, menghargai hak-hak minoritas dan individu dilakukan melalui diskusi dan persuasi, bukan melalui cara yang koersif dan represif.

Salah satu penerapan prinsip demokrasi di Indonesia adalah dilaksanakannya Pemilu, sebagai ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin serta perwakilannya di parlemen selama lima tahun ke depan. Pemilu bahkan diakui sebagai arena pembentuk demokratisasi perwakilan dalam upaya pergantian pemerintahan secara berkala. Pemilu menjadi sebuah mekanisme universal dalam pelaksanaan sistem politik di negara-negara demokratis dan terlembagakan secara institusional.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan dasar hukum yang mengatur sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu, ada pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, dan memilih bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kegiatan Pemilu di Indonesia menjadi suatu agenda penting dalam proses demokratis dan penentu kepemimpinan di tingkat nasional maupun daerah. Pemilu diselenggarakan dengan melibatkan warga negara sebagai pemilih.

Setiap warga negara dijamin hak pilihnya, namun juga terdapat kriteria tertentu untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Pasal 198 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan syarat menjadi pemilih adalah : (1)Warga negara Indonesia (WNI); (2) Berusia 17 tahun atau lebih pada saat hari pemungutan suara dilakukan, atau

sudah/pernah kawin. Lalu dalam Pasal 199 UU No. 7 Tahun 2017 ditentukan untuk bisa menggunakan hak memilih WNI harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam UU No.7 Tahun 2017.

Suksesnya penyelenggaraan Pemilu tidak bisa lepas dari partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih dianggap sebagai tolok ukur dari sistem demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu (Saleh, 2022). Partisipasi pemilih menunjukkan tingkat kesadaran politik serta kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap pemerintah (Surbakti, 1992). Keterkaitannya dengan demokrasi dan legitimasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Ada keterkaitan yang erat antara partisipasi pemilih, demokrasi, dan legitimasi. Pengaruh partisipasi pemilih terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan sangatlah signifikan dalam konteks demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi pemilih menjadi aspek yang krusial dari tatanan negara demokrasi, sekaligus menjadi salah satu indikator modernisasi politik yang berlangsung.

Umumnya, ada dua faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam masyarakat, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seringkali muncul karena kendala teknis atau pekerjaan, sehingga menghambat pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Sementara faktor eksternal timbul karena permasalahan administratif, kurangnya sosialisasi, atau aspek politik yang memengaruhi pemilih. Tingginya jumlah masyarakat yang menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu akan berdampak pada tingkat partisipasi politik dalam masyarakat, yang selanjutnya juga dapat berpengaruh pada berjalannya dinamika demokrasi.

Dalam pelaksanaannya, Pemilu dilaksanakan oleh satu lembaga yang bersifat nasional, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu misinya yaitu meningkatkan kualitas pemilih pada Pemilu dan partisipasi pemilih. Ukuran keberhasilan KPU dalam melaksanakan Pemilu adalah terselenggaranya Pemilu secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil (LUBER Jurdil) dan tingkat partisipasi yang tinggi.

Dilansir dari halaman Kompas.id, data nasional menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 dibandingkan dengan Pemilu 2019. Penurunan tingkat partisipasi ini khususnya terjadi pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pusat. Semula, pada Pemilu 2019 angka partisipasi Pilpres mencapai 81,97%, sedangkan pada Pemilu 2024 sedikit turun menjadi 81,78%. Tingkat partisipasi pemilih pada Pileg 2019 adalah 81,78%, sedangkan pada Pileg 2024 menurun di angka 81,42%. Namun, angka-angka tersebut masih melampaui target RPJMN 2020 – 2024, yakni 79,5%.

Menurunnya angka partisipasi di level nasional, walaupun tidak signifikan, tetap menandakan adanya sejumlah aspek yang perlu dioptimalkan. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak secara keseluruhan terjadi di daerah. Terdapat beberapa daerah yang memiliki angka partisipasi lebih tinggi dari data nasional dan justru mengalami peningkatan. Salah satunya adalah Kabupaten Lamongan. Data yang didapatkan dari laman KPU (<https://kab-lamongan.kpu.go.id/> 1) menunjukkan jumlah partisipasi masyarakat Kabupaten Lamongan pada Pemilu 2024 meningkat sebesar 3,42% dari Pemilu 2019. Partisipasi masyarakat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sebesar 81,95%, sedangkan pada tahun 2019 partisipasi

masyarakat Kabupaten Lamongan hanya mencapai 78,53%. Hasil ini menunjukkan KPU Kabupaten Lamongan sudah mencapai target partisipasi masyarakat yang ditetapkan oleh KPU pusat sebesar 77,5%.

Tabel 1.1
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dan 2024

No	Pemilu	Data Pemilih Tetap	Partisipasi Pemilih
1	2019	1.052.013	78,53%.
2	2024	1.044.779	81,95%

Sumber: <https://kab-lamongan.kpu.go.id/> 2

Berdasarkan Tabel 1.1 terjadi peningkatan jumlah pemilih dan partisipasinya. Jumlah pengguna hak suara naik dengan presentase sebesar 3,42%. Jumlah tersebut sangat signifikan, kenaikan tingkat partisipasi pemilih merupakan salah satu bentuk keberhasilan KPU Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaan Pemilu. KPU Kabupaten Lamongan dibentuk sejak tahun 2003 dengan tujuan dapat menyelenggarakan Pemilu secara adil, objektif juga kredibel sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membangun kesadaran politik. Salah satu standar keberhasilan KPU adalah tercapainya strategi-strategi yang dapat diterima segala kalangan sehingga berhasil meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan.

Proses manajemen strategis menjadi langkah yang penting bagi KPU Kabupaten Lamongan untuk mencapai target kenaikan angka partisipasi pemilih. Strategi yang digunakan oleh KPU mencerminkan adanya upaya secara matang untuk mencapai tujuan dengan menggabungkan perencanaan (*planning*) dan

pengelolaan (*management*) dalam praktik operasionalnya. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU menjadi garda yang penting untuk memastikan dinamika pesta demokrasi yang digelar secara periodik tersebut dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang baik serta adil bagi semua pihak.

Tercapainya kenaikan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Lamongan tentunya memiliki strategi-strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Terlebih, di tingkat pusat justru menunjukkan adanya penurunan angka partisipasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU daerah diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan sumber daya lokal sesuai dengan kearifan wilayah setempat guna merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat. Tetapi, di sisi lain KPU tetap harus bertindak profesional dengan menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kesadaran tentang hak serta kewajibannya sebagai warga negara, termasuk dalam aspek menyalurkan hak pilih.

Berdasarkan fenomena dan data pendukung di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pemilih berpartisipasi pada Pemilu Kabupaten Lamongan tahun 2024 dan alasan mengapa strategi tersebut dilakukan guna meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Lamongan. Atas dasar itu, penelitian ini dibuat dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tahun 2024?
2. Bagaimana realisasi strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat diketahui sebuah tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis strategi yang dikehendaki (*intended strategi*) oleh Komisi Pemilihan Umum yang meliputi sasaran (*goals*), kebijakan (*policies*), dan rencana (*plans*) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tahun 2024
2. Menganalisis realisasi strategi (*realized strategic*) oleh Komisi Pemilihan Umum yang meliputi formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tahun 2024

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari kajian penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan penelitian yang diharapkan bagi peneliti lainnya untuk meneliti lebih dalam mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih, serta menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam studi Ilmu Pemerintahan Khusus yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum.
2. Untuk menghasilkan bahan pustaka sebagai bahan masukan bagi Ilmu Pemerintahan dalam mengetahui dan mempelajari tentang strategi Komisi Pemilihan Umum yang terealisasikan, serta berguna sebagai referensi maupun pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Kota Lamongan, penelitian ini bermanfaat sebagai gambaran untuk menjadi masukan atau bahan dasar referensi untuk menambah konsep-konsep dalam pelaksanaan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang dimiliki lembaga Komisi Pemilihan Umum. Strategi yang terealisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum akan mampu menciptakan hasil output yang baik dan dapat memberikan dampak yang besar dalam perolehan suara saat pemilu di kota Lamongan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan

pemahaman mengenai bentuk strategi Komisi Pemilihan Umum. Di samping itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat dalam mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan strategi yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum.

3. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian tentang strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih maka peneliti mampu mengetahui langkah-langkah dari strategi yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu di Kabupaten Lamongan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum baik tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota secara bebas, rahasia, jujur, adil, dan langsung.

1.5 Penelitian Terdahulu

Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih dan evaluasi program serta strategi yang dikembangkan telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lainnya, antara lain sebagai berikut: Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Gading Fadhila, Hendra Alfian dan Akhmad Rosihan yang telah dipublikasi dalam Jurnal Massa pada tahun 2020 dengan judul “Strategi komunikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada 2020”. Penelitian ini berfokus pada perencanaan proses program dan fakta lapangan dalam memberikan pengetahuan serta informasi secara menyeluruh kepada masyarakat khususnya pemilih di Kabupaten OKU. Strategi yang dilakukan dalam program sosialisasi menggunakan

metode komunikasi tatap muka dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Hasil dari penelitian ini dimulai dari strategi Komisi Pemilihan Umum yang menggunakan cara-cara baru seperti melibatkan budaya-budaya lokal dengan disesuaikan tren (gaya) saat ini. Strategi tersebut berhasil karena meningkatnya pemilih dari yang awalnya 73,03% pada tahun 2015 hingga 79% pada tahun 2020 (Fadhilla, Alfian, dan Rosihan, 2020).

kedua, penelitian yang dilakukan oleh Esa Meliana dan Suharno yang berjudul “Strategi dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kabupaten Bantul tahun 2020 di masa pandemic covid -19 oleh Komisi Pemilihan Umum”. Penelitian ini memiliki fokus strategi peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Bantul tahun 2020 yang pada saat itu bertepatan pada masa pandemic covid-19. Disebutkan strategi awal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah menasar strategi dalam jaringan (daring), Melalui media social seperti WhatsApp, Youtube, Facebook, Instagram, Website KPU Kabupaten Bantul, Google Meet, dan Zoom Meeting mereka berusaha memberikan sosialisasi langkah awal. Selanjutnya mereka memilih untuk strategi komunikasi secara tatap muka dengan pemilih pemula, penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Agar sosialisasi menjadi menarik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul juga mengadakan lomba kreativitas yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bantul, Lomba kreativitas tersebut dibuat beragam dari mulai pembuatan meme, video, dan poster. Strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan program-program tersebut untuk meningkatkan partisipasi pemilih, namun karena saat itu sedang pandemi covid-19 Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tetap menemui hambatan seperti masyarakat yang tetap enggan berpartisipasi dan juga hambatan teknis dari pihak internal (Meliana dan Suharno, 2022)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arum Hastuti dan Sunarso yang berjudul “Analisis Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan fokus pada menganalisis strategi sosialisasi yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul. Melalui Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini disebutkan bahwa strategi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menggunakan pendekatan *top down* dan *bottom down* sebagai landasan dalam setiap langkah pelaksanaan strategi yang akan dijalankan, sehingga implementasi dari *bottom up* adalah pelaksanaan sosialisasi yang memiliki sasaran kelompok sosial terkecil seperti keluarga. Sedangkan implementasi dari *top down* terbentuknya produk hukum tentang penyelenggaraan pemilihan. Hasil dari penerapan strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam pemilihan Kepala Daerah 2020 adalah dengan tetap mengoptimalkan sosialisasi *offline* maupun *online* dengan prosentase 30% untuk sosialisasi tatap muka dan 70% untuk sosialisasi secara online melalui media yang telah dibentuk. Strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul berhasil menjadikan Kabupaten Bantul sebagai pemilih tertinggi se-Daerah Istimewa Yogyakarta (Hastuti dan Sunarso, 2021)

Empat, penelitian ini dilakukan oleh Dewi Lestari, Ruskin Azikin dan

Samsir Rahim dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 Di Kabupaten Pinrang”. Penelitian ini berfokus pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang memiliki strategi formulasi dan sasaran yang jangka panjang seperti membuat program relawan demokrasi yang memiliki tugas sosialisasi ke masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Terdapat 3 sasaran segmen Komisi Pemilihan Umum yang akan diberikan sosialisasi yaitu Pelajar Sekolah Menengah Atas yang berstatus pemilih pemula, masyarakat umum dan mahasiswa. Metode yang digunakan berupa sosialisasi *online* dan *offline* yang dilakukan oleh relawan demokrasi yang sebelumnya sudah mendapat bimbingan teknis. (Lestari, 2020)

Lima, penelitian ini dilakukan oleh Ilham Saputra, Suryanef, Al Rafni, dan Irwan yang di publikasi dalam *Journal of Civic Education* dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Solok Selatan Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilihan dalam Pilkada 2020”. Jurnal ini menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum yang menjalin hubungan erat kerja sama dengan tokoh adat maupun masyarakat dapat membawa dampak yang besar, salah satunya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam Penelitian ini disebutkan bahwa keterlibatan tokoh adat dan tokoh masyarakat sangat membantu dalam penyebaran informasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian sosialisasi yang dilakukan dapat terjadi dari mulut ke mulut melalui tokoh adat dan tokoh masyarakat (Saputra, Suryanef, dan Rafni, 2022).

Enam, judul penelitian yang disampaikan oleh Zuli Kasmawanto dan Santi

Nurjannah adalah "Strategi KPUD Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak 2019", dipublikasikan di Jurnal Humanis Vol. 3 No. 1. Dalam jurnal ini, dijelaskan upaya yang dilakukan oleh KPUD Lamongan dalam menerapkan strategi yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Strategi yang diterapkan KPUD dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas melibatkan program sosialisasi yang dilakukan secara langsung melalui komunikasi tatap muka tanpa perantara. Informasi terkait jadwal, tahapan, serta program pemilihan disampaikan, sambil memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat disabilitas tentang pentingnya partisipasi mereka dalam mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa fokus utama penelitian sebelumnya pada strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu/pilkada sebelumnya dan tidak di Kabupaten Lamongan. Sudah ada yang meneliti di Kabupaten Lamongan tetapi fokus pada pemilih disabilitas pada Pemilu 2019. Penelitian ini fokus pada strategi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih (umum) di Pemilu 2024.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Konsep Strategi

Chandler (1962) mendefinisikan strategi adalah alat dalam mencapai tujuan organisasi yang melibatkan tujuan jangka panjang, rencana aksi dan pengalokasian sumber daya, tidak hanya sebagai cara mencapai tujuan namun juga untuk

memastikan kelangsungan organisasi dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Marrus (2002:31) menyebutkan bahwa strategi merupakan sebuah proses yang dirancang oleh para pemimpin puncak organisasi yang berfokus pada tujuan jangka panjang dan mencakup cara-cara untuk mencapainya. Dalam konteks ini, strategi merupakan metode atau cara yang sistematis dan terarah, digunakan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai fungsi dasar manajemen, strategi berperan penting dalam menetapkan arah organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Gregory G. Dess dan Alex Miller (1993) membagi strategi menjadi dua tipe utama: strategi yang dikehendaki dan strategi yang direalisasikan.

A. Strategi yang Dikehendaki (*Intended Strategic*), strategi ini pada dasarnya terdiri dari tiga elemen, yaitu sasaran-sasaran (*goals*), kebijakan (*policies*), dan rencana-rencana (*plans*).

1. Sasaran-sasaran (*Goals*): Ini adalah target yang organisasi atau perusahaan ingin berusaha capai. Sasarannya dapat bersifat luas, seperti mencapai kebahagiaan dalam hidup, atau bersifat sempit, yang fokus pada tindakan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Gregory G. Dess, dalam Saladin (2003) membedakan sasaran ini menjadi tiga tingkatan: 1) Visi, yang mendefinisikan apa yang organisasi atau perusahaan ingin lakukan; 2) Misi, yang mengatur batas sasaran yang ingin dicapai dan bertindak sebagai prinsip dasar dalam merealisasikan visi; 3) Tujuan-tujuan, yang merupakan target yang lebih spesifik.

2. Kebijakan (*Policies*): Ini adalah pedoman untuk melakukan tindakan yang kebijakannya dapat membimbing bagaimana organisasi mencapai sasaran-sasarannya yang telah dibuat sebagai tujuan sebelumnya.
3. Rencana-rencana (*Plans*): Ini adalah tindakan yang diambil oleh manajer organisasi dan dirumuskan dalam pernyataan tentang apa yang akan dilakukan di masa depan, seperti dijelaskan oleh Amalia (2019:3).

B. Strategi yang Direalisasikan (*Realized Strategic*), merupakan apa yang telah dicapai atau telah direalisasikan oleh organisasi atau perusahaan.

Proses perumusan strategi melibatkan beberapa tahap, dimulai dari formulasi strategi, dilanjutkan dengan implementasi strategi, dan diakhiri dengan evaluasi strategi. Proses ini dikenal sebagai manajemen strategi, yang menurut Wheleen dan Hunger (dalam Umar, 2010:16), merupakan rangkaian keputusan dan tindakan manajerial jangka panjang untuk menentukan kinerja perusahaan. Heene, dkk (2010:76) juga menggambarkan manajemen strategi sebagai suatu proses manajemen puncak yang mengarahkan kegiatan dan fungsi organisasi, fokus pada pemvisualisasian atau penerapan agenda strategis organisasi.

Menurut Dirgantoro (2001:94), proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap, sebagai berikut:

a) Formulasi Strategi:

Formula strategi dapat mencakup dan melibatkan pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta penemuan kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Dengan

menetapkan tujuan jangka panjang dalam organisasi, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan strategi alternatif, serta memilih strategi yang akan diterapkan.

b) Implementasi Strategi:

Implementasi strategi merupakan tahapan kunci dalam proses pelaksanaan strategi, meski tetap memerlukan pemantauan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan tetap melibatkan penetapan sasaran, pembuatan kebijakan, motivasi karyawan, dan alokasi sumber daya untuk pelaksanaan strategi. Pada dasarnya dalam mengimplementasikan strategi memerlukan pengembangan budaya yang dapat mendukung strategi melalui penciptaan struktur organisasi yang efektif, pengalokasian sumber daya, pengarahan pemasaran, penyusunan anggaran, pengembangan sistem informasi, dan korelasi kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.

Menurut Amir (2011:192), implementasi strategi adalah serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk mengeksekusi perencanaan strategis. Sehingga implementasi strategi memerlukan keterkaitan dengan rumusan strategi dan kebijakan yang kemudian diimplementasikan dalam program kerja, anggaran, dan prosedur-prosedur organisasi. Melalui proses tersebut diharapkan bahwa implementasi strategi dapat berjalan dengan maksimal.

c) Evaluasi Strategi:

Evaluasi strategi merupakan tahap terakhir dari manajemen strategi

yang melibatkan analisis mendalam terkait alasan strategi yang dirumuskan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan melakukan pengkajian ulang terhadap faktor-faktor eksternal dan internal dapat menjadi landasan dalam perumusan strategi. Selanjutnya dapat dilakukan juga dengan mengukur tingkat kinerja yang telah dilaksanakan dan yang terakhir adalah melakukan tindakan korektif terkait implementasi strategi.

Tahap evaluasi strategi, menurut David (2005:308), terdiri dari tiga kegiatan dasar, yaitu:

1. Memeriksa dasar yang mendasari strategi Perusahaan
2. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan rencana aktual,
3. Mengambil tindakan korektif untuk memastikan kinerja sesuai dengan rencana yang dirumuskan.

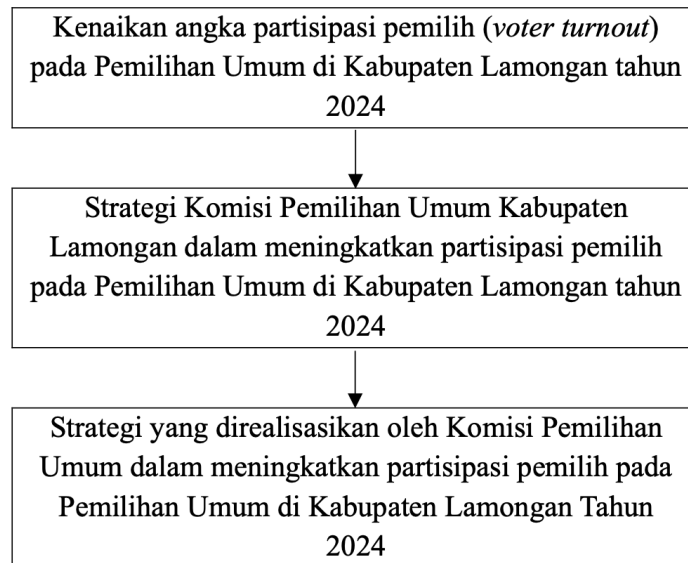
Secara keseluruhan, manajemen strategi melibatkan proses yang sistematis, rasional, dan efektif dalam pengembangan diri organisasi melalui formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi yang sesuai dengan tujuan dan misi strategis yang telah ditetapkan. Ini mencakup apa saja yang telah berhasil dicapai atau direalisasikan oleh organisasi atau perusahaan, mencerminkan implementasi dari strategi yang dikehendaki. Secara keseluruhan, strategi yang dikehendaki mencakup rencana, pedoman, dan tujuan yang organisasi tetapkan, sedangkan strategi yang direalisasikan adalah hasil nyata dari penerapan strategi tersebut.

Strategi pada dasarnya terbagi kedalam empat tipe. Menurut Koteen (1991)

tipe-tipe strategi terbagi menjadi empat yaitu:

- a. *Corporaty Strategy*. Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategik yang baru. pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu, apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. *Program Strategy*. Strategi ini lebih memberikan perhatian pada implikasi-implikasi strategik dari suatu program tertentu. apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan dan bagaimana pula dampaknya bagi sasaran organisasi.
- c. *Resource Support Strategy*. strategi pendukung sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan lain sebagainya.
- d. *Institutional Strategy*. Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif inisiatif strategik

1.7 Alur Pemikiran



1.8 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, strategi didefinisikan sebagai fungsi dasar dari manajemen organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan langkah organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang sebagai suatu cara atau metode untuk mencapai tujuan tertentu yang terstruktur dan terarah. Adapun lingkup strategi yang dimaksud mengerucut pada upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lamongan untuk mencapai kenaikan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

1. Definisi Strategi

Strategi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai fungsi dasar dari manajemen organisasi yang berfungsi sebagai alat untuk menentukan langkah-langkah organisasi dalam jangka pendek maupun panjang untuk

mencapai tujuan tertentu secara terstruktur dan terarah. Strategi yang dimaksud mengerucut pada upaya-upaya KPU Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

2. Lingkup Strategi

Penelitian ini mengkaji dua aspek utama strategi, yaitu strategi yang dikehendaki (*intended strategy*) dan realisasi strategi (*realized strategy*). Dua aspek ini menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana KPU Kabupaten Lamongan merumuskan dan merealisasikan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Lingkup strategi yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup dua aspek besar, yakni strategi yang dikehendaki (*intended strategic*) dan realisasi strategi (*realized strategic*). Dua aspek tersebut akan menjawab rumusan masalah penelitian yang berfokus pada bagaimana KPU Kabupaten Lamongan merumuskan dan merealisasikan strategi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

A. Intended strategic

Strategi yang dikehendaki sendiri terdiri dari penentuan sasaran (*Goals*) yang dituangkan dalam visi, misi, dan tujuan KPU Kabupaten Lamongan adalah meningkatkan angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Kedua, kebijakan (*Policies*), Kebijakan yang digunakan adalah PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketiga, rencana (*Plans*): KPU Kabupaten Lamongan merencanakan berbagai

kegiatan sosialisasi yang masif dan efisien. Mereka mengoptimalkan metode sosialisasi, baik melalui media massa, media sosial, maupun tatap muka langsung, untuk mencapai pemilih di berbagai segmen masyarakat.

B. *realized strategic*

Pada aspek realisasi strategi, bagian ini akan melihat bagaimana strategi diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi untuk perbaikan pada kemudian hari. Formulasi Strategi sendiri, dimana strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk analisis segmen pemilih, kebutuhan sumber daya, dan potensi tantangan yang dihadapi. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Kedua, Implementasi Strategi dengan melibatkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang telah direncanakan. KPU Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan media untuk memastikan pesan-pesan pemilu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Setelah implementasi, KPU Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas strategi yang telah dijalankan. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan strategi ke depan, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil semakin efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

1.9 Metode Penelitian

Metode merupakan serangkaian langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan penelitian. Penelitian sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh informasi atau data melalui pendekatan ilmiah. Dengan demikian, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau jalur yang digunakan oleh peneliti untuk menggali informasi atau menyelidiki suatu masalah secara mendalam dengan mengikuti langkah-langkah tertentu (Darmadi, 2014).

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bersifat deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk meneliti sebuah objek penelitian atau fenomena yang ada sebagai sebuah sistem, dengan melihat objek kajian dari satuan yang terdiri dari unsur sehingga saling terkait dan mengungkapkan fakta ataupun keadaan (Setiaji, 2016). Desain penelitian ini relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang lebih berfokus pada analisis mendalam untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang bagaimana suatu strategi direalisasikan untuk mencapai tujuan.

Pendekatan deskriptif merupakan sebuah pendekatan yang menggambarkan, menginterpretasikan objek atau menggambarkan fenomena maupun gejala yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dihubungkan dengan teori yang relevan juga dapat digunakan pada variabel penelitian (Darmadi, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yaitu untuk menjelaskan atau menggambarkan mengenai bagaimana Komisi Pemilihan Umum membuat strategi dalam meningkatkan

partisipasi pemilih pada saat Pemilihan Umum berlangsung.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang ada di Jl. Basuki Ramat No 207, Pagerwojo Sukomulyo, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang diyakini oleh peneliti memiliki data-data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian.

1.9.3 Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Tujuan dari penentuan sampel ini bukanlah untuk merepresentasikan populasi, tetapi untuk merepresentasikan informasi yang diinginkan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengharuskan sampel untuk mewakili populasi, dengan persentase atau rumus tertentu dalam pengambilan sampel, penelitian kualitatif tidak terikat pada pertimbangan tersebut. Artinya, dalam penelitian kualitatif, ketika peneliti hendak meneliti suatu masyarakat di suatu wilayah, informan yang dipilih mungkin terbatas, tetapi yang terpenting adalah informasi yang mereka sampaikan dianggap mewakili informasi secara keseluruhan. Informan yang dimaksud antara lain:

1. Ketua Komisioner Divisi Sosialisasi Khoirul Anam S.IP
2. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Emi Setiawati, S.H
3. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia Suja'i, S.H

4. Staff Komisi Pemilihan Umum Indra Ikrimah Fauziah, S.IP

1.9.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang didasarkan dari hasil memperolehnya

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data primer diperoleh langsung dari wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan, seperti Anggota Komisi Pemilihan Umum

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebagai data pendukung data primer yaitu data yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi atau instansi. Sumber data ini merupakan data pendukung dalam sebuah penelitian. Meliputi data yang berasal dari arsip, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang diperoleh dari instansi terkait.

1.9.5 Teknik Pengumpul Data

Dalam upaya memperoleh data, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan berupa :

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab atau bertatap muka secara langsung antara informan dan

penanya, dengan sebuah daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur (Darmadi, 2014). Data yang diperoleh dari wawancara ini berasal dari sudut pandang informan (emic) sehingga hasil dari wawancara mendalam ini akan menghasilkan sebuah data yang berasal dari pendapat dan pandangan informan terkait dengan objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Wawancara ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu wawancara terencana (*standardized interview*) dan wawancara tak terencana (*unstandardized interview*). Wawancara terencana memiliki daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, sedangkan wawancara tak terencana tidak memiliki persiapan dan aturan yang baku. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua jenis wawancara dengan mempersiapkan pokok bahasan pertanyaan dalam panduan wawancara. Panduan ini memberikan kelonggaran untuk pertanyaan lain yang muncul saat wawancara. Sebelum berbicara, peneliti menjelaskan maksud dan tujuannya untuk mendapatkan sudut pandang informan yang lebih luas dan kaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan data-data seperti sumber catatan-catatan literatur, gambar yang tersaji saat observasi dan pesan singkat yang merupakan bagian dari informasi yang diberikan oleh informan dan buku-buku yang berhubungan dengan

pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih luas dan terpercaya, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan berkaitan dengan penelitian penulis.

1.9.6 Validasi Data

Data yang telah diperoleh perlu untuk diuji keabsahannya agar dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dilakukan melalui Teknik triangulasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross check hasil wawancara maupun sumber yang telah diperoleh dari narasumber maupun informan yang kemudian ditanyakan kembali kepada informan lain yang masih berkaitan antara satu sama lain agar nantinya didapat data maupun jawaban yang jelas.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Setelah data yang terkumpul melalui Teknik pengumpulan data campuran maka data yang diperoleh akan berupa catatan lapangan, foto, video, transkrip wawancara, dokumen yang dikeluarkan badan yang bertanggung jawab serta jurnal. Seluruh data akan dikumpulkan dan dilakukan analisis dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data interaktif.

1.9.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis yang bertujuan untuk menyaring, mengelompokkan, mengarahkan, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan, serta mengorganisasi data secara sistematis agar kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam reduksi data, informasi diuraikan menjadi hal-hal pokok, difokuskan pada aspek yang dianggap penting, dan pola data dieksplorasi. Melalui proses ini, gambaran yang lebih jelas dapat terbentuk, memudahkan peneliti dalam tahap pengumpulan data selanjutnya.

1.9.7.2 Penyajian Data

Setelah mereduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data, dimana dalam proses ini disajikan kumpulan info yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Pada proses ini data disajikan dengan cara diklasifikasikan sesuai masalah yang diangkat. Penyajian data juga dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan serta bentuk hubungan antara kategori dan sejenisnya.

1.9.7.3 Kesimpulan

Setelah kedua tahap diatas selesai maka masuk ke tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulan ini didasarkan pada hasil susunan narasi serta penyajian data sebelumnya yang memberikan jawaban atas masalah penelitian, sehingga kesimpulan menjadi rinci dan jelas dan menjadikannya sebagai tahap terakhir yang disusun untuk mengetahui hasil dari apa yang telah didapat sebelumnya.